

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Studi mengenai sejarah perkotaan saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan studi ini tidak lepas dari pengaruh perkembangan kontemporer tentang masalah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang mulai bergeser ke wilayah perkotaan.<sup>1</sup> Wilayah perkotaan mempunyai keunikan dan karakteristik masing-masing, berbagai aktifitas masyarakat telah membentuk sebuah pola kehidupan yang dinamis di dalamnya.

Banyak kriteria yang dipakai untuk menyatakan suatu wilayah layak atau tidak disebut dengan kota.<sup>2</sup> Di Indonesia yang dimaksud kota meliputi kota praja, ibu kota kabupaten, dan tempat lain yang bercirikan urban.<sup>3</sup> Daerah kota bisa sederhana dan bisa juga kompleks. Daerah perkotaan dapat mempunyai suasana pedesaan atau suasana perbengkelan industri, dapat bersuasana damai atau penuh dengan segala macam pertentangan. Daerah perkotaan bisa berukuran kecil dan mudah dipelihara ataupun sangat besar dan dipenuhi dengan

---

<sup>1</sup> Sri Margana dan M. Nursam, *Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta:Ombak, 2010, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>3</sup> *Ibid.*

masalah-masalah ekonomi dan pertentangan.<sup>4</sup> Wilayah perkotaan bisa menjadi sebuah pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat perdagangan, atau bisa pula mencakup semua hal tersebut. Dengan demikian, sebuah wilayah tidak bisa serta-merta disebut sebagai kota hanya karena wilayahnya yang luas ataupun karena jumlah penduduknya yang padat. Banyak definisi dari berbagai sudut pandang yang bisa dijabarkan untuk mengkaji sebuah wilayah agar bisa disebut sebagai sebuah kota.

Berdasarkan definisi kota tersebut Banyumas dan Purwokerto mempunyai kriteria yang tepat sebagai sebuah kota. Kota Banyumas merupakan pusat pemerintahan yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830-an sekaligus sebagai pusat perekonomian khususnya di wilayah Karesidenan Banyumas. Keberadaan Sungai Serayu yang tepat di sebelah utara Kota Banyumas membuat Kota Banyumas ramai dikunjungi oleh para pengusaha maupun pedagang yang akan membawa barang dagangannya ke Pelabuhan Cilacap melalui Sungai Serayu.

Kota Purwokerto pun merupakan sebuah kota pemerintahan. Sebelum pemerintah kolonial Belanda menghapus status Kota Purwokerto dan memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten dan

---

<sup>4</sup> Gallion B. Arthur dan Eisner Simon Faia, APA, AICP, *The Urban Pattern, City Planning and Design, Fifth Edition* (Terjemahan Ir. Sussongko dan Ir. Januar Hakim), *Buku Pengantar Perancangan Kota, Desain dan Perencanaan Kota, Edisi Lima Jilid I*. Jakarta: Erlangga, 1996, hlm. 3.

Karesidenan Banyumas ke Kota Purwokerto, wilayah Kota Purwokerto merupakan pusat pemerintah Kabupaten Purwokerto. Dengan berbagai karakteristiknya, Kabupaten Banyumas dan Purwokerto sebagai sebuah wilayah yang terintegrasi dengan wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah mempunyai peran yang cukup penting, khususnya dalam perkembangan sejarah di wilayah Jawa.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Banyumas terletak diantara  $108^{\circ} 39' 17''$ - $109^{\circ} 27' 15''$  BT dan  $7^{\circ} 15' 05''$ - $7^{\circ} 37' 10''$  LS. Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.759 Ha. Wilayah Kabupaten Banyumas lebih dari 45% merupakan daerah dataran yang tersebar dibagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur. Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25-100 M dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 M dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.<sup>5</sup>

Batas wilayah sebelah barat Kabupaten Banyumas adalah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, batas sebelah selatan adalah Kabupaten Cilacap, batas sebelah timur adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen, dan batas sebelah utara adalah Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.<sup>6</sup> Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kota di lembah Sungai Serayu yang memiliki hulu di pegunungan Dieng serta

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kab. Banyumas, *Banyumas dalam Angka*, Purwokerto: Anyar Offset, 2002, hlm. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*

bermuara di Samudera Hindia. Sungai Serayu membelah wilayah Karesidenan<sup>7</sup> Banyumas. Selain itu, wilayah Karesidenan Banyumas juga merupakan wilayah dengan gunung-gunung dan bukit-bukit sehingga cukup menyulitkan untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Akan tetapi dengan kondisi geografis yang demikian, wilayah-wilayah Kabupaten Banyumas yang berada dipinggiran Sungai Serayu mempunyai kesuburan tanah yang sangat bagus.

Wilayah Banyumas dahulu merupakan daerah mancanegara dari kerajaan-kerajaan Jawa sejak Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, Kartasura hingga Kasunanan Surakarta. Setelah perang Jawa<sup>8</sup> (Perang Diponegoro, tahun 1825-1830), Kadipaten Banyumas dilepaskan dari kekuasaan Kasunanan Surakarta dan menjadi wilayah kekuasaan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda tahun 1830.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dalam KBBI karesidenan berarti rumah/kantor residen atau daerah yang dikepalai residen.

<sup>8</sup> Perang Jawa (1825-1830) atau lebih dikenal dengan nama Perang Diponegoro merupakan salah satu perang tersulit yang dialami pemerintah kolonial Belanda. Dalam perang ini, Diponegoro mendapatkan bantuan dari Sunan Pakubuwono VI Raja Kasunanan Surakarta. Kemenangan pemerintah kolonial Belanda dalam perang ini membuat Kasunanan Surakarta harus kehilangan beberapa wilayahnya sebagai konsekuensi atas terlibatnya Sunan memihak Diponegoro. Sunan Pakubuwono sendiri akhirnya diasingkan ke Ambon hingga wafatnya.

<sup>9</sup> Budiono Herusatoto, *Banyumas Sejarah, Budaya, Bahasa, dan watak*, Yogyakarta: LKiS, 2008, hlm. 13.

Sebagai kota kabupaten yang telah berdiri sejak 1582,<sup>10</sup> berdasarkan Resolusi Dewan Hindia Belanda tanggal 22 Agustus 1831 Nomor 1 dibentuklah Karesidenan Banyumas. Wilayah Karesidenan Banyumas terdiri dari lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purwokerto.<sup>11</sup> Dengan dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, kemudian Banyumas dibangunlah menjadi sebuah kota *Residente* (Karesidenan).

Dalam sejarah keberadaan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, kebijakan tentang pembangunan-pembangunan wilayah perkotaan sudah dilakukan sejak sekitar tahun 1600-an. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Karesidenan Banyumas khususnya dan di wilayah-wilayah lain di Indonesia umumnya telah diatur dalam peraturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah kolonial Belanda. Peraturan pertama yang mengatur tentang ketentuan hukum perkotaan adalah “*De statuten van 1642*” merupakan peraturan produk *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang isinya mengatur pembangunan jalan, jembatan, bangunan, serta menentukan wewenang dan tanggungjawab

---

<sup>10</sup> Berdasarkan seminar hari jadi Banyumas yang diselenggarakan pada tanggal 14 November 1989 di Pendopo Si Panji, Purwokerto, ditetapkan bahwa Kadipaten Banyumas berdiri pada hari Jumat, 6 April 1582.

<sup>11</sup> Budiono Herusatoto, *op. cit.*, hlm. 14.

dewan kota. Peraturan ini relatif lengkap karena telah mencakup tata ruang kota, garis sempadan, pemeliharaan air dan sebagainya. Dalam peraturan ini telah digariskan pedoman utama dalam penataan kota, baik dalam aspek keamanan, kesehatan lingkungan serta lalu lintas beserta pedoman bagi penguasa dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam praktek.<sup>12</sup> Dengan dilaksanakannya peraturan ini maka mulai sekitar akhir tahun 1600-an pemerintah kolonial Belanda semakin banyak melakukan pembangunan-pembangunan di wilayah Indonesia.

Peraturan kedua yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda yang berkaitan dengan pembangunan wilayah-wilayah perkotaan di Indonesia adalah penyesuaian sistem pemerintahan Belanda yang dilakukan pada tahun 1903, dengan diterbitkannya *Desentralisatie Wet* yang tertuang dalam *Staatsblad. No. 329*, pemerintah Belanda memberi otonomi kepada daerah dengan hak menetapkan anggaran belanja sendiri, dan hak menetapkan peraturan lokal dengan persetujuan Dewan Jenderal. Undang-Undang desentralisasi yang mendasari terbentuknya sistem pemerintahan kota praja (*stads gemeente*), *Staatblad 1905/137*, semakin mendorong berlangsungnya otonomi pemerintah daerah atau pemerintah kota praja. Pada tahun 1905 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan khusus

---

<sup>12</sup> Respati Wikantiyoso, *Paradigma Perencanaan dan Perancangan Kota*, Yogyakarta: Perpustakaan UGM, Tanpa Tahun, hlm. 54.

yang mengatur perkotaan, yaitu *I Localen Raden Ordonatie*, *Staatblaad 1905 No. 181* yang memberi wewenang kepada dewan rakyat daerah dan kota untuk menetapkan ketentuan bangunan lokal.<sup>13</sup>

Setelah ditetapkannya Banyumas sebagai wilayah karesidenan sekaligus ibukota karesidenan pada 22 Agustus 1831 pemerintah kolonial Belanda segera menunjuk De Sturler untuk menjadi residen<sup>14</sup> pertama di Banyumas. Pemerintah kolonial Belanda kemudian mulai membangun Kota Banyumas sebagai ibukota Karesidenan Banyumas. Disamping itu Banyumas juga merupakan ibukota Kabupaten Banyumas yang wilayahnya meliputi *Onderdistrict* Banyumas, *Onderdistrict* Adireja dan *Onderdistrict* Klampok.

Kabupaten Banyumas yang dibangun Belanda pada saat itu memiliki banyak gedung-gedung megah dan kokoh, diantaranya adalah gedung *Resident*, gedung *Societeit*, kantor *pos en telegram*, kantor telepon, *European School*, *Holland Inlander School*, *Inlander School*, *hospital*, *Chinese School*, *pandhuis kantoer* (pegadaian), Hotel Carolina, *Zoutpakhuis* (gudang garam), *gevangenis* (Penjara), *brandspuit* (gedung pemadam kebakaran), dan *districtshoofd* (kantor

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>14</sup> Dalam KBBI residen berarti pegawai pamong praja yang mengepalai daerah (bagian dari provinsi yang terdiri dari beberapa kabupaten).

distrik).<sup>15</sup> Selain itu rumah orang-orang Belanda juga banyak didirikan di Banyumas, terutama di daerah Menganti dan Kedung Uter.<sup>16</sup> Hingga saat ini beberapa dari bangunan-bangunan tersebut masih berdiri dengan kokoh, walaupun dengan kondisi yang sudah sangat tidak terawat.

Kota Purwokerto sendiri dahulu bernama Purwakerta atau Prakerta. Kota ini mulai dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda semenjak dijadikan sebagai ibukota Kabupaten Ajibarang, yang sebelumnya berada di Ajibarang. Pemindahan ke Purwokerto dilakukan pada tahun 1836 setelah Kota Ajibarang terkena bencana angin lisus. Pada saat pemindahan itu, Bupati Ajibarang dijabat oleh Raden Tumenggung Bartadimeja bergelar Raden Adipati Martadireja II dan Asisten Residen Werkevisser.

Pemerintah kolonial Belanda membangun Kota Purwokerto sedikit menjauh dari pusat Kota Purwokerto sebelumnya, yaitu pasar wage. Sebagai sebuah ibukota kabupaten, pembangunan infrastruktur di Purwokerto pun banyak dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hal ini bisa dilihat dengan adanya bangunan seperti sekolah-sekolah seperti *MULO*, *Holland-Javaanse School*, *Holland-Chinese School*, dan *Vervolgschool Voor Meisjes* ( Sekolah lanjutan untuk

---

<sup>15</sup> <http://www.banjoemas.com/2011/03/ibukota-banyumas.html>. Diakses 22/11/2013.

<sup>16</sup> *Ibid.*



Perempuan), gedung pertemuan, tram hotel, kantor *Landskas* (tempat bekerja asisten residen), klinik pabrik gula.<sup>17</sup>

Kota Purwokerto memiliki kondisi yang memadai sebagai syarat untuk sebuah kota besar, hingga setelah Kabupaten Ajibarang digabung dengan Kabupaten Banyumas pada 31 Desember 1935, Ibu kota kabupaten pun akhirnya dipindah dari Kota Banyumas ke Purwokerto pada tahun 1937 dengan dipindahkannya pula pendopo si Panji yang telah berusia 194 tahun.

Dari beberapa fakta yang disebutkan di atas bisa dilihat bahwa sebagai sebuah kabupaten dan karesidenan, Banyumas mempunyai karakteristik yang unik dan mempunyai sejarah panjang yang sangat menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang perpindahan pusat pemerintahan kabupaten Banyumas ke kota Purwokerto tahun 1937 ini. Selain karena kedekatan emosional, dimana penulis merupakan orang asli keturunan Banyumas juga karena nilai historis yang masih sangat terasa dari peristiwa tersebut. Melalui penelitian ini, peneliti berharap bisa menemukan hal-hal yang belum terungkap selama ini terkait peristiwa perpindahan pusat pemerintahan kabupaten Banyumas tersebut.

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada peristiwa Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Purwokerto yang terjadi pada tahun 1930-1937. Oleh karena itu melalui penelitian berjudul "Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto Tahun 1930-1937" ini peneliti mencoba meneliti hal tersebut dengan harapan akan memperoleh informasi-informasi baru yang selama ini belum terungkap. Sehingga pemahaman masyarakat tentang peristiwa tersebut akan lebih nyata.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas pada tahun 1930-an?
2. Bagaimana proses perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto?
3. Bagaimana kondisi Kota Banyumas pasca peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum
  - a. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis, sistematis, analitis dan objektif sesuai dengan metodologi dalam mengkaji suatu peristiwa.

- b. mempraktikkan penerapan metodologi penelitian sejarah dalam penyusunan karya sejarah.
- c. Menambah perbendaharaan karya penulisan sejarah, khususnya tentang sejarah perkotaan.
- d. Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui .kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas tahun 1930-an?
- b. Mengetahui proses terjadinya peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto.
- c. Mengetahui kondisi Kota Banyumas pasca peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Pembaca

- a. Pembaca dapat mengetahui kondisi umum wilayah Kabupaten Banyumas tahun 1930-an?.
- b. Pembaca dapat memperoleh wawasan tentang proses terjadinya peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto tahun 1930-1937.

- c. Pembaca dapat memperoleh pengetahuan tentang kondisi Kota Banyumas pasca perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto tahun 1930-1937.

## 2. Bagi Penulis

- a. Sebagai tolak ukur untuk mengetahui kemampuan penulis dalam merekonstruksi dan menganalisis peristiwa sejarah.
- b. Sebagai upaya untuk melatih berfikir kritis dan objektif dalam menyikapi sumber sejarah yang ada.
- c. Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan kesejarahan, terutama mengenai peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto tahun 1930-1937.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.<sup>18</sup> Penelitian bisa hanya menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan kedua-duanya. Melalui kajian pustaka inilah penulis mendapatkan sumber-sumber atau literatur yang dapat digunakan sebagai sumber penunjang dalam penulisan penelitian ini.

Masuknya pemerintah kolonial Hindia Belanda ke wilayah Banyumas tahun 1830 memberikan dampak yang besar. Pemerintah

---

<sup>18</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2003, hlm. 3.

kolonial mulai membangun wilayah Banyumas menjadi sebuah wilayah karesidenan dengan berbagai infrastruktur pendukungnya. Hal ini mengakibatkan kondisi pemerintahan, ekonomi, dan sosial mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 1833, pemerintah kolonial Hindia Belanda secara resmi membentuk wilayah Banyumas menjadi sebuah karesidenan. Dengan dibentuknya Banyumas menjadi wilayah karesidenan maka wilayah Banyumas dipimpin oleh seorang residen yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Karesidenan Banyumas membawahi lima kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Purwokerto. Kantor residen Banyumas dibangun di Banyumas dan pejabat residennya adalah orang Belanda<sup>19</sup>. Dalam menjalankan tugasnya, residen dibantu oleh asisten residen serta bupati-bupati yang bertanggung jawab terhadapnya.

Bupati Kabupaten Banyumas pada saat terjadi peristiwa pembentukan karesidenan pada tahun 1833 adalah Tumenggung Cakranegara II (1830-1879). Akan tetapi karena hubungan yang tidak harmonis antara Tumenggung Cakranegara II dengan Residen Banyumas saat itu, maka mulai tahun 1879 pemerintah kolonial melalui Residen Banyumas mengganti Bupati Cakranegara II dengan KPA Martadireja. KPA Martadireja mendapatkan gelar Aria dan berganti nama, menjadi KPA Aria Gandasubrata. Sejak saat itu nama

---

<sup>19</sup> Budiono Herusatoto, *op. cit.*, hlm. 116.

trah bupati Banyumas berganti nama menjadi Gandasubrata hingga yang terakhir adalah RAA Sujiman Mertasubrata Gandasubrata yang menjabat Bupati Banyumas dari tahun 1933-1950.<sup>20</sup>

Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang sangat subur. Hal ini disebabkan adanya sungai Serayu yang membelah wilayah Banyumas menjadi dua bagian. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya dan di Karesidenan Banyumas umumnya banyak yang mengandalkan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Selain itu keberadaan sungai Serayu pun memberikan berkah lain bagi masyarakat di wilayah Banyumas. Melalui aliran sungai Serayu inilah aktifitas ekonomi dan perdagangan hidup. Barang-barang dagangan yang datang dari pelabuhan Cilacap menuju Banyumas ataupun sebaliknya diangkut dengan menggunakan kapal tradisional melalui sungai Serayu.

Kondisi tanah yang sangat subur, serta potensi-potensi lain yang menjanjikan ternyata tidak serta merta membuat pemerintah kolonial membangun wilayah kabupaten Banyumas menjadi sebuah kota yang besar sehingga sejajar dengan kota-kota besar lainnya di pulau Jawa, seperti Semarang, Bandung ataupun Yogyakarta. Pemerintah kolonial Belanda beranggapan bahwa, walaupun Banyumas merupakan wilayah yang subur, tetapi wilayah kabupaten

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

Banyumas merupakan wilayah yang terisolasi. Hal ini terjadi karena, keberadaan bukit-bukit serta gunung yang mengelilingi wilayah kabupaten Banyumas, sehingga Banyumas tidak akan mempunyai jalur transportasi yang memadai.

Tahun 1895 menjadi awal meredupnya jalur transportasi di Sungai Serayu. Pada tahun 1895 pemerintah kolonial Hindia Belanda menandatangani nota kesepakatan kerja dengan perusahaan trem swasta untuk memberikan izin pengoperasian *Serajoedal Stoomtran Maatshappij* (SDS) mengeksploitasi wilayah lembah Sungai Serayu. Keadaan yang demikian menjadi bertambah buruk saat pembangunan jalur kereta api Batavia-Vorstenlanden yang dilakukan oleh *Staatsporwegen* (SS) melewati kota Purwokerto. SS membangun stasiun di Kota Purwokerto. Akibatnya kantor-kantor dagang yang dulu bergantung pada pelayaran Sungai Serayu memindahkan kantornya ke Purwokerto yang telah memiliki stasiun dan halte. Tidak adanya tram maupun kereta api yang pada waktu itu merupakan sarana transportasi vital menjadikan kabupaten Banyumas semakin sepi. Kondisi tersebut kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda memindahkan kantor pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto pada tahun 1937.

Krisis ekonomi dunia yang melanda pada akhir tahun 1920-an hingga awal tahun 1930-an memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian di Karesidenan Banyumas. Banyak pabrik-

pabrik gula yang gulung tikar, seperti pabrik gula Kalibagor, Sumpiuh, Klampok, Purwokerto serta Bojong. Kondisi yang demikian, membuat pemerintah kolonial Belanda melakukan rencana penghapusan dan penggabungan beberapa kabupaten. Termasuk dalam usulan ini adalah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto. Usulan pemindahan ibu kota kabupaten dan karesidenan dilakukan oleh Residen Banyumas H. G. F. van Huls.<sup>21</sup>

Pro dan kontra dalam Dewan Kabupaten mengenai isu pemindahan pusat pemerintahan sulit memperoleh titik temu. Kekhawatiran yang muncul dalam benak para Anggota Dewan adalah Kota Banyumas yang sudah lengang akan semakin bertambah sepi apabila sudah tidak menjadi ibu kota. Diperkirakan angka pengangguran akan meningkat karena tutupnya perusahaan listrik dan *waterleiding* dikarenakan kurangnya pelanggan. Hal yang sama pun akan menimpa rumah sakit Juliana, ELS serta HIS.<sup>22</sup>

Setelah melalui perdebatan, serta pro dan kontra yang panjang, akhirnya pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas resmi dipindah ke Kota Purwokerto pada tanggal 6 Januari 1937. Perayaan atas

---

<sup>21</sup> Purnawan Basundoro, *Transportasi dan Eksploitasi Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1830-1940*, Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UGM, 1999, hlm. 222.

<sup>22</sup> Prima Nurahmi M, (2010), “Runtuhnya Suatu Kejayaan: Kota Banyumas 1900-1937”, dalam Sri Margana dan M. Nursam (Ed), *Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: Ombak, 2010, hlm. 28.



perpindahan pusat pemerintahan tersebut pun dilakukan dengan meriah pada 7 Januari 1937.

Dengan pindahanya pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto, maka berubahlah wajah Kabupaten Banyumas. Meski telah menjadi tempat tinggal bupati sejak abad ke-16 dan kemudian menjadi ibukota karesidenan sejak masuk ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah kolonial namun hal tersebut tidaklah cukup membuat Kabupaten Banyumas bertahan sebagai sebuah pusat di wilayahnya.

Untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah pertama diatas, penulis menggunakan buku yang berjudul "*Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa , dan Watak*". Buku karya penulis asli Banyumas ini diterbitkan oleh penerbit LKIS Yogyakarta pada tahun 2008. Dalam buku ini dituliskan tentang sejarah awal karesidenan Banyumas, kondisi geografis kabupaten Banyumas serta budaya, bahasa dan watak masyarakat Banyumas pada umumnya. Selain buku tersebut, penulis juga menggunakan buku karya Sartono Kartodirdjo yang berjudul "*Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*". Buku tersebut merupakan buku yang diterbitkan pada tahun 1977 oleh Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia. Buku tersebut berisi memori-memori serah jabatan para residen di Jawa Tengah, termasuk di antaranya memori Residen Banyumas.

Selain buku- buku tersebut, untuk mendukung data yang penulis peroleh, untuk rumusan masalah yang kedua penulis juga menggunakan sumber arsip. Arsip yang digunakan berupa arsip *“Memorie Van Overgave Van den Resident van Banjoemas”* seri 2 E. Arsip tersebut berisi memori serah jabatan dari beberapa Residen Banyumas yang menjabat antara tahun 1930-an. Seperti W.Ch. Adrians dan G.F. van Huls.

Peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Purwokerto merupakan sebuah proses yang panjang. Awal dari munculnya gagasan pemindahan pusat pemerintahan tersebut adalah ketika terjadi kekosongan bupati di Kabupaten Purbalingga pada tahun 1896. Dengan kekosongan bupati tersebut mengakibatkan pemerintah kolonial Belanda harus mengambil kebijakan untuk segera mengangkat bupati baru. Namun akhirnya kekosongan bupati tersebut dapat teratasi setelah pemerintah kolonial Belanda mengangkat seorang bupati baru menggantikan bupati yang lama.

Pada tahun 1930-an wacana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto kembali muncul. Hal tersebut tak terlepas dari modernisasi transportasi yang terjadi serta krisisekonomi global yang melanda wilayah Karesidenan Banyumas. Dengan kondisi krisis tersebut pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan untuk menggabungkan wilayah Kabupaten

Banyumas dan Kabupaten Purwokerto. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda tersebut tertuang dalam *staatsblaad* tahun 1935 no. 631 dan no. 632 tentang penghapusan Kabupaten Purwokerto dan penggabungan wilayah Kabupaten Purwokerto dengan wilayah Kabupaten Banyumas. Kebijakan penggabungan wilayah kabupaten tersebut memperkuat wacana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto.

Setelah melalui perdebatan serta pro dan kontra akhirnya rencana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto menjadi kenyataan. Pada tanggal 6 Januari 1937 secara resmi pusat pemerintah Kabupaten Banyumas dipindahkan ke Kota Purwokerto. Sebagai bentuk perayaan atas pindahnya pusat pemerintahan tersebut, pada tanggal 7 Januari 1937 pemerintah bersama masyarakat pun mengadakan arak-arakan yang meriah.

Untuk menjawab permasalahan di atas tentang proses perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto, penulis menggunakan literatur buku yang berjudul "*Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan sosial*". Buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Ombak pada tahun 2010. Buku ini merupakan buku kumpulan artikel penelitian dari beberapa peneliti di Indonesia. Buku kumpulan artikel ini ditulis oleh Sri Margana dan M. Nursam. Melalui buku ini penulis sangat terbantu karena didalam buku ini terdapat artikel yang secara

husus membahas tentang Kabupaten Banyumas dari tahun 1900-1937. Artikel tersebut merupakan salah satu bagian skripsi yang ditulis ulang dengan penambahan-penambahan sumber yang diperoleh dari perpustakaan KITLV Leiden, Belanda sebagai salah satu kontribusi dalam rangka perayaan ulang tahun ke-70 Prof. Dr. Djoko Suryo.

Selain itu penulis juga menggunakan literatur buku berjudul *“Sejarah Lokal, Konsep, Metode, dan Tantangannya”*. Buku ini juga ditulis oleh sejarawan asli Banyumas bernama Sugeng Priyadi. Buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Ombak pada tahun 2012. Dalam buku karya Sugeng Priyadi ini sedikit diungkapkan juga cuplikan-cuplikan kondisi Kabupaten Banyumas terutama Banyumas sebagai wilayah administratif, seperti sejarah Kabupaten Banyumas mulai dari masa kerajaan di Jawa hingga masa kolonial.

Selain kedua buku tersebut, untuk mendukung data yang penulis peroleh, untuk rumusan masalah yang kedua penulis juga menggunakan sumber arsip. Arsip yang digunakan berupa arsip *“Memorie Van Overgave Van den Resident van Banjoemas”* seri 2 E. Arsip tersebut berisi memori serah jabatan dari beberapa Residen Banyumas yang menjabat antara tahun 1930-an. Seperti W.Ch. Adrians dan G.F. van Huls.

Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto tahun 1937 mempunyai pengaruh terhadap Kota

Banyumas sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas yang sudah berumur ratusan tahun. Pendopo si Panji yang menjadi simbol pemerintahan di Kabupaten Banyumas dan menjadi salah satu bangunan yang dikeramatkan pun kemudian dipindahkan ke Kota Purwokerto. Setelah peristiwa perpindahan pusat pemerintahan tersebut Kota Banyumas pun mengalami berbagai perubahan.

Untuk menjawab permasalahan diatas yang merupakan bagian dari rumusan masalah ketiga tentang kondisi Kabupaten Banyumas pasca peristiwa perpindahan pusat pemerintahan, penulis menggunakan buku yang sama seperti pada rumusan masalah yang pertama yaitu buku yang berjudul "*Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan sosial*". Buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Ombak pada tahun 2010.

Selain itu, sebagai penguat dari data yang diperoleh dari buku tersebut, penulis juga menggunakan sumber arsip. Arsip yang digunakan berupa "*Memorie Van Overgave Van den Resident van Banjoemas*" seri 2 E. Arsip tersebut berisi memori serah jabatan dari beberapa Residen Banyumas yang menjabat antara tahun 1930-an. Seperti W.Ch. Adrians dan G.F. van Huls.

#### **F. Historiografi yang Relevan**

Historiografi yang relevan adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan menganalisis secara kritis semua rekaman dan

peninggalan masa lampau.<sup>23</sup> Historiografi adalah usaha untuk mensintesis data-data atau fakta-fakta sejarah menjadi suatu kisah yang jelas dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam buku catatan atau artikel maupun perubahan sejarah. Sedangkan historiografi yang relevan adalah karya penelitian sejarah lain yang memiliki kesamaan dengan tema yang akan ditulis.<sup>24</sup> Penulis menemukan beberapa karya yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian skripsi karya Prima Nurahmi Mulyasari mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2006 yang berjudul "*Dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Karesidenan: Purwokerto 1900-1942*". Skripsi ini menjadi historiografi yang relevan dan menjadi salah satu pembanding hasil penelitian penulis. Dalam skripsi karya Prima Nurahmi Mulyasari ini, pembahasan lebih banyak membahas tentang Kota Purwokerto. Dalam skripsi ini dibahas mulai dari cikal bakal Kota Purwokerto, Purwokerto menjadi sebuah kabupaten, hingga kemudian Purwokerto menjadi pusat pemerintahan Karesidenan Banyumas. Sedangkan penulis dalam penulisan penelitian ini akan lebih banyak meneliti dan

---

<sup>23</sup> Louis Gootschalk, *Understanding history*, Terj. Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, Jakarta: UI Press. 1975, hlm. 32.

<sup>24</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006, hlm. 3.

mengkaji tentang Kabupaten Banyumas dan perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto.

Historiografi yang relevan berikutnya adalah tesis karya Dina Dwikurniarini mahasiswi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 1999 berjudul *“Epidemi di Karesidenan Banyumas Tahun 1870-1940”*. Pokok permasalahan yang dibahas pada tesis ini adalah identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi wabah penyakit, sehingga menimbulkan kematian yang tinggi dikalangan penduduk karesidenan Banyumas. Kemudian tentang pengaruh kondisi lingkungan dan tata ruang Karesidenan Banyumas terhadap persebaran penyakit di wilayah Karesidenan Banyumas. Tesis tersebut sangat berguna bagi penulis sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, terutama pada kajian tentang kondisi lingkungan serta tata ruang Karesidenan Banyumas.

Karya tulis hasil penelitian selanjutnya yang penulis jadikan sebagai historiografi yang relevan adalah tesis karya Purnawan Basundoro mahasiwa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 1999 berjudul *“Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Bayumas tahun 1930-1940”*. Fokus utama dari penelitian ini adalah terhadap perkembangan transportasi dan ekonomi secara umum yang terjadi di Karesidenan Banyumas pada tahun 1930-1940. Tesis hasil penelitian dari Purnawan Basundoro ini menjadi salah satu

historiografi yang relevan yang sangat penting pula bagi penulis dalam penulisan skripsi yang akan dilakukan ini.

## **G. Metodologi Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Metode Penulisan**

Metode berasal dari kata *method* dalam bahasa Inggris atau *methodos* dalam bahasa Yunani yang artinya jalan atau cara. Menurut Helius Sjamsuddin metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau teknik yang sistematis dalam penyidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah kritis. Dalam penerapannya metode sejarah kritis meliputi proses mengumpulkan, menguji, menganalisis sumber dengan disertai kritik, baik itu kritik intern maupun ekstern yang kemudian disajikan dalam tulisan karya sejarah.<sup>26</sup> Penulisan karya ilmiah sejarah dengan menggunakan metode sejarah kritis dengan mengandalkan sumber-sumber atau literatur guna mencari dan menggali informasi tentang fakta-fakta sejarah. Tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo

---

<sup>25</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm. 11.

<sup>26</sup> Nugroho Notokusanto, *Norma-Norma dan Penelitian Sejarah*, Jakarta: Dephankam, 1971, hlm. 19.



mempunyai lima tahap yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (penulisan).<sup>27</sup>

a. Pemilihan Topik

Langkah awal dalam sebuah penelitian adalah menentukan permasalahan yang akan dikaji. Pemilihan topik harus dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan kedekatan emosional.<sup>28</sup> Dua hal tersebut sangatlah penting karena akan berpengaruh kepada aspek subjektif dan objektif penulis. Seorang peneliti apabila menyukai topik penelitian yang dipilihnya maka akan bekerja dan mampu menyelesaikan penelitian dengan baik. Topik yang dipilihnya harus dapat dikerjakan dalam waktu yang tersedia dan temanya tidak terlalu luas.

b. Heuristik

Heuristik merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti sejarah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber menurut bahannya dibagi dua yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis.<sup>29</sup> Sumber tertulis bisa berupa arsip, surat kabar, buku, maupun sumber lain yang bentuknya tertulis. Sedangkan sumber tidak tertulis bisa berupa rekaman gambar, suara, foto, benda-benda artefak dan sebagainya.

---

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka, 2005, hlm. 90.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

Dalam penulisan penelitian Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto Tahun 1930-1937 ini, penulis lebih mengutamakan sumber tertulis. Dengan penelitian ini, penulis melakukan pencarian sumber sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber yang ada kemudian dikategorikan berdasarkan sifatnya, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merupakan sumber-sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari orang yang menyaksikan peristiwa itu sendiri.<sup>30</sup> Sumber ini merupakan laporan peristiwa yang dipaparkan oleh pelaku maupun orang sejaman yang menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber primer bukan hanya orang yang hadir atau menyaksikan sendiri atau pelaku peristiwa tersebut, namun juga orang-orang yang berada disekitar tempat kejadian selama peristiwa berlangsung. Jika mengacu pada definisi diatas, maka sumber primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan pemindahan pusat pemerintahan dari Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto Tahun 1930-1937, diantaranya adalah:

1. *Staatsblad* tahun 1929 no. 242, tetang  
Pembentukan Pemerintahan, Desentralisasi

---

<sup>30</sup> Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer Suatu Pengalaman*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1978, hlm. 35.

Kabupaten-kabupaten Jawa Tengah, Petunjuk Kabupaten Banyumas menjadi Kota Mandiri.

2. *Staatsblad* tahun 1935 no. 631. tentang Pembentukan Pemerintahan, Desentralisasi Kabupaten-Kabupaten Jawa Tengah, Peraturan hukum publik akibat dari penghapusan Kabupaten Purwokerto dan penggabungan wilayah itu dengan Kabupaten Banyumas, yang mana kabupaten dari distrik Purworejo digabung dengan Kabupaten Banjarnegara.
3. *Staatsblad* tahun 1935 no. 632. Tentang Urusan Dalam Negeri Jawa Tengah, Setelah penunjukan administrasi pembagian provinsi Jawa Tengah sehubungan dengan penghapusan Kabupaten Karanganyar, Batang, dan Purwokerto.
4. J. J Helsdingen, "Memori Residen Banyumas, 14 Mei 1928 " *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977.
5. M. J. van der Pauwert. 1925. Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925 " *Memori Serah*

*Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta:

Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977.

6. W. Ch. Adrians, *Memorie van Overgave Residen van Banjoemas 1933*, microfilm seri 2e reel 6, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
7. Surat Kabar *Djawa Tengah*, Regent Poerwokerto, Oepatjara Pemakean Kaboepaten Jang Baroe Dibikin Betoel. Senen, 11 Janoeari 1937, hlm. 2.
8. Surat Kabar Matahari Regent Poerwokerto, Oepatjara Pemakean Kaboepaten Jang Baroe Dibikin Betoel. 9 Januari 1937, hlm. 2.

Sumber sekunder merupakan sumber-sumber pendukung yang dapat digunakan penulis untuk menggali informasi lebih dalam dokumen-dokumen sejamin. Umumnya sumber sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memperoleh informasi dari peristiwa yang dikisahkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber-sumber skunder berupa buku-buku yang terkait dengan sejarah Banyumas. Buku-buku tersebut diantaranya adalah:

1. A. Daliman. (2001). *Sistem Politik dan Administrasi Hindia-Belanda*. Yogyakarta:

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri  
Yogyakarta.

2. Badan Pusat Statistik Kab. Banyumas. (2002). *Banyumas dalam Angka*, Purwokerto: Anyar Offset.
3. Harjosewoyo Kaswadi. (2010). *Patikraja Sedjarahmu Tempoe Doeloe hingga era Reformasi*. Banyumas: tanpa keterangan penerbit.
4. Herusatoto Budiono. (2008). *Bayumas Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*. Yogyakarta: LKiS.
5. Priyadi Sugeng. (2007). *Sejarah Intelektual Banyumas*. Yogyakarta: Aksara Indonesia.
6. Purwoko. S. Bambang (2012). *Sejarah Banyumas*. Purwokerto: Graha Ilmu.
7. Wijono Soegeng dan Sunardi. (2006). *Banjoemas Riwajatmoe Doeloe*. Purwokerto: Daya Mandiri Production.
8. Wirjaatmadja R. dan R. Poerwasoepradja. (1932). *Babad Banjoemas*. Banjoemas: tanpa penerbit.

### c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber adalah kegiatan meneliti untuk menentukan validitas dan reabilitas sumber sejarah melalui kritik ekstern dan kritik intern.<sup>31</sup> Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sumber tersebut otentik atau tidak jika dilihat dari segi bentuk, bahan, tulisan dan sebagainya. Sedangkan kritik intern dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan persoalan apakah isi sumber dapat dipercaya atau tidak. Dalam kegiatan kritik sumber, penulis berusaha mencari sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, serta melakukan kritik sumber dengan membandingkan berbagai macam sumber yang telah didapat baik itu sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis.

### d. Interpretasi (Penafsiran)

Interpretasi adalah proses pemaknaan fakta sejarah. Dalam interpretasi terdapat dua tahapan penting, yaitu analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan). Fakta-fakta sejarah dapat diuraikan dan disatukan sehingga mempunyai makna yang berkaitan satu dengan yang lainnya.<sup>32</sup> Analisis berarti menguraikan data yang diperoleh dengan berdasarkan fakta yang

---

<sup>31</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 100-101.

<sup>32</sup> I Gede Widja, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*, Jakarta: Depdikbud, 1989, hlm. 18.

ada. Kemudian sintesis adalah menyatukan data-data hasil interpretasi kita sehingga dapat dipahami.

e. Penulisan Sejarah (Historiografi)

Historiografi adalah tahapan terakhir dari metode sejarah. Setelah sumber terkumpul kemudian dilakukan kritik menjadi data dan kemudian dimaknai menjadi fakta sejarah, langkah terakhir adalah menyusun semuanya menjadi satu tulisan utuh berbentuk narasi kronologis. Dalam tahap ini penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian, yaitu pengantar, hasil penelitian atau isi, dan simpulan. Pengantar hendaknya mengemukakan latar belakang permasalahan, historiografi dan pendapat kita tentang tulisan orang lain, teori dan konsep yang akan dipakai, dan sumber-sumber sejarah. Pada bagian hasil penelitian atau isi penulis harus mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya didukung oleh sumber yang mendukung.<sup>33</sup>

## 2. Pendekan Penelitian

a. Pendekatan Politik

Pengertian politik dapat bermacam-macam sesuai dari sudut mana memandangnya, namun pada umumnya definisi politik menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Fokus perhatian ilmu politik, karenanya, lebih tertuju pada gejala-gejala

---

<sup>33</sup> Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 101.

masyarakat seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen dan perilaku kepemimpinan, masa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik dan lain sebagainya. Pada masa pemerintahan kolonial tepatnya antara tahun 1930-1937, pemerintah Belanda mempunyai kekuasaan yang begitu besar. Wilayah kabupaten Banyumas pada saat itu pun dijadikan salah satu wilayah yang penting bagi pemerintah kolonial Belanda.

b. Pendekatan Geografis

Pendekatan geografis adalah pendekatan yang menyoroti tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, dan fauna serta hasil yang diperoleh bumi. Pendekatan geografis ini digunakan penulis untuk mempelajari kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas. Sebagai sebuah wilayah yang berstatus sebagai ibukota kabupaten dan karesidenan kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas sangat penting untuk dikaji. Sehingga penulis mempunyai gambaran lebih luas tentang latar belakang terjadinya peristiwa perpindahan pusat pemerintahan ke Kota Purwokerto.



### c. Pendekatan Ekomomi

Pendekatan ekonomi merupakan suatu penjabaran dari konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang berkaitan dengan sistem sosial dan stratifikasi yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam keadaan ekonomi sehingga dapat dipastikan hukum kaidahnya. Pendekatan dari segi ekonomi diperlukan oleh penulis untuk membahas kondisi perekonomian masyarakat kabupaten Banyumas pada sekitar tahun 1930-1937.

## H. Sistematika Pembahasan

Penulisan Penelitian berjudul “Perpindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto tahun 1930-1937” ini secara sistematis terdiri dari:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang relevan, metode dan pendekatan penelitian serta sistematika pembahasan yang berisi garis besar dari penelitian ini.

## **BAB II. GAMBARAN KONDISI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS DAN KOTA PURWOKERTO TAHUN 1930-an**

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum kondisi wilayah Kabupaten Banyumas. Dalam bab ini dipaparkan mengenai gambaran geografis Kabupaten Banyumas, kondisi sosial dan ekonomi penduduk Kabupaten Banyumas, serta kondisi pemerintahan Kabupaten Banyumas sekitar tahun 1930- 1937.

## **BAB III. PERPINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUMAS KE KOTA PURWOKERTO**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang terjadinya peristiwa perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto. Selain itu dalam bab ini juga dipaparkan tentang proses peristiwa perpindahan tersebut.

## **BAB IV. KOTA BANYUMAS PASCA PERPINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KE KOTA PURWOKERTO**

Dalam bab ini dibahas mengenai kondisi Kota Banyumas pasca terjadinya peristiwa perpindahan pusat pemerintahan ke Kota Purwokerto.

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil dari pembahasan dan sekaligus menjawab pertanyaan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan.

